

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



RANCANGANKERJA (RENJA) 2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

UmumDPMPTSP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sanjungkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 dapat selesai sesuai waktu. Renja awal ini disusun berdasarkan evaluasi Renja terdahulu untuk penyelarasan program dan kegiatan dengan RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta realisasi tahunan Rencana Strategik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berisi rencana yang akan dilaksanakan dan target yang akan diraih Tahun 2020. Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hasil kerja tersebut hendaknya akan lebih memotivasi untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan. Demikian pula sebaliknya atas kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan introspeksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak atas keterbatasan tersebut.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta perlindungan-Nya bagi kita, Amin.

KEPALA DINAS,

H. YAN ERY, S.Pt, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700930 199703 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten, sedangkan untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke tiga dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan SKPD, RPJMD Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra SKPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra SKPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan.

Program dan Kegiatan SKPD tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Di samping itu dalam penyusunan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Terkait dengan Renstra SKPD tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, yang berfungsi dengan sebagai referensi perencanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah baru dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Renja). Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala SKPD/ OPD harus segera menetapkan Renja SKPD masing-masing, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus segera menyusun dan menetapkan Renja Akhir 2020.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23):

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda Tahun 2020;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2020;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau Program

Program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Akhir (RENJA Akhir) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun lalu dan capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

TABEL : T-C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPM DAN PTSP DAN PENCAPAIAN RENSTRA DPM DAN PTSP S.D 2019
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra SKPD Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan					
						Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)		11 = (10/4)			
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Lancar													
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	100

			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Dana Pemakaian Telepon, Air dan Listrik	12	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	100
			Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	100
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa dan alat Kebersihan Kantor	12	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	100
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	100

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	100
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	100
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Jamuan Rapat/ Tamu	12	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	100
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah dan dalam daerah	Tersedianya Biaya Rapat/ Konsultasi	12	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	100
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan srana dan prasarana layak guna Perangkat daerah													

				Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	-	100%	100%	100	-	100	100	100	100	100	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100	-	1	Paket	100
					Tersedianya perlengkapan pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	6	6 Unit Komputer (PC) 6 Unit Printer	-	6	6 Unit Komputer (PC) 6 Unit Printer	6	6 Unit Komputer (PC) 6 Unit Printer	100	-	6	6 Unit Komputer (PC) 6 Unit Printer	100
					Tersedianya sarana aplikasi online pelayanan perizinan dan non perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				Pemeliharaan rutin/ Berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	12	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	100
				Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Dana Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3	Unit kendaraan roda 4	-	3	Unit kendaraan roda 4	3	Unit kendaraan roda 4	100	3	Unit kendaraan roda 4	3	Unit kendaraan roda 4	100
						18	Unit kendaraan roda 2	-	18	Unit kendaraan roda 2	18	Unit kendaraan roda 2		18	Unit kendaraan roda 2	18	Unit kendaraan roda 2	100
				Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Dana Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	100
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkatdisiplin aparatur													

			Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	78	Stell Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	-	78	Stell Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	78	Stell Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	100	60	Stel	110	Stel	100
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN sesuai kompetensi			-										
			Pengembangan SDM	Meningkatnya sumberdaya aparatur (SDM)	12	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	24	Bulan	100
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peresentase Perangkat daerah dengan nilai AKIP " B "													
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	25	Buku	-	25	Buku	25	Buku	100	-		-		100

					1	Buku Laporan Kegiatan		1	Buku Laporan Kegiatan	1	Buku Laporan Kegiatan	100	1	Buku Laporan Kegiatan	1	Buku Laporan Kegiatan	100
			Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Tersedianya perencanaan penanaman modal yang dapat digunakan oleh Investor, Instansi, dan Unit Kerja Lain	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100	3	Sektor	3	Sektor	100
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi													
			Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal PMDN/PMA	15	Perusahaan	-	15	Perusahaan	15	Perusahaan	100	10	Perusahaan	25	Perusahaan	166
			Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terjaganya Iklim Investasi Berjalan dengan Baik	15	Perusahaan	-	15	Perusahaan	15	Perusahaan	100	-	-	15	Perusahaan	100

			Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Tersediannya mekanisme perizinan penanaman modal	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100	-	-	1	Dokumen	100
			Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Izin yang diterbitkan Sesuai peraturan			-										
			Survei indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan Kaulitas Pelayanan dal;am Penyelenggaraan Pelayanan	Nilai	A	-	Nilai	A	A	Nilai	100	A	Nilai	A	Nilai	100
			Penanganan Pengaduan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal	Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat	20	Kasus	-	20	Kasus	20	Kasus	100	20	Kasus	20	Kasus	100
			Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Perizian dan Non Perizinan	150	Orang	-	150	Orang	150	Orang	100	120	Orang	270	Orang	180

				Pemeriksaan Layanan Perijinan	Keluarnya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan	2800	Naskah Ijin	-	2800	Naskah Ijin	2800	Naskah Ijin	100	2500	Naskah Ijin	5300	Naskah Ijin	189
				Peningkatan Inovasi Layanan	Percepatan dan peningkatan kualiatas pelayanan perizinan	90	Naskah Ijin	-	90	Naskah Ijin	90	Naskah Ijin	100	84	Naskah Ijin	174	Naskah Ijin	193
				Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan	Terinventarisasiny a Data Perizinan dan Non Perizinan Kab. Tanjab Barat	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	Dokumen	1	Dokuemn	1

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, telah ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat
2. Meningkatnya realisasi investasi
3. Meningkatnya nilai investasi

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dimaksud adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel T-C.30 sebagai berikut :

**TABEL : T-C.30
PENCAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat	Skor IKM		Nilai A	Nilai A	Nilai A	Nilai A	81,77	-	80	84	Sesuai dengan renstra 2016-2021
2.		Meningkatnya kecepatan pengurusan izin		7 Hari	7 Hari	6 Hari	3 Hari	7 Hari	-	6 Hari	4 Hari	Sesuai dengan renstra 2016-2021
3.		Meningkatnya jumlah investor PMA dan PMDN		20 Perusahaan	10 Perusahaan	15 Perusahaan	20 Perusahaan	31 Perusahaan	-	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Sesuai dengan renstra 2016-2021

4.	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya informasi dan peta potensi investasi	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	Sesuai dengan renstra 2016-2021
5.		Meningkatnya jumlah pengurusan izin	2.500 Izin	2.500 Izin	2.800 Izin	2.900 Izin	1.672 Izin	-	2.900 Izin	2.950 Izin	Sesuai dengan renstra 2016-2021
6.		Pemutakhiran (Updating) Data dan Analis Data/ Informasi Penanaman Modal	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	Sesuai dengan renstra 2016-2021
7.		Penanganan Pengaduan dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	-	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	13 Kasus	-	20 Kasus	20 Kasus	Sesuai dengan renstra 2016-2021

8.		Meningkatnya kesadaran investor terhadap kewajibannya		15 Perusahaan	20 Perusahaan	15 Perusahaan	20 Perusahaan	31 Perusahaan	-	20 Perusahaan	20 Perusahaan	Sesuai dengan renstra 2016-2021
9.	Meningkatnya Kualitas SDM	Pelayanan Investasi		-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	2 Kebijakan	2 Kebijakan	Sesuai dengan renstra 2016-2021

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean government. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya terbatas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang dikelola saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi - fungsi penegakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini.

Dengan Pelayanan yang mudah, cepat dan transparan, diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dapat menjadi ikon Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penegakan Reformasi Birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menjadi Kantor Percontohan Zona Integritas dari KPK Republik Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan upaya -upaya agar Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang dikelola antara lain :

1. Pengembangan Teknologi Informasi dalam pelayanan perijinan dan non perijinan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan juga pengembangan inovasi - inovasi baru dalam penyampaian informasi dengan menggunakan Jaringan Internet, Website, Email dan berbagai peralatan yang terkomputerisasi sehingga akurasi dan tranparansi dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas yang tinggi. Setiap Sumber Daya Manusia (Pegawai) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib menandatangani Pakta Integritas setiap tahunnya di hadapan Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan memahami Kode Etik yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Pegawai) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.
Dalam melaksanakan kegiatan dan program-programnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Penyelenggara Pelayanan Perizinan terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu antara lain:
 - Belum optimalnya penerapan dan standar oprasional prosedur tersebut untuk tiap-tiap proses penyelenggaraan perizinan
 - Adanya keterbatasan Sumber Daya Mansuia baik kualitas maupun dalam mendukung pelaksanaan program

- Adanya keterbatasan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki belum menandai dalam memperlancar pelayanan publik
- Pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan di DPMPTSP belum Optimal
- Implementasi waktu penyelesaian proses perizinan dan sesuai SOP belum Optimal
- Masih ada peraturan daerah yang belum dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk Teknis
 1. Pemahaman masyarakat tentang layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih rendah
 2. Pelaksanaan SOP Perizinan belum efektif
 3. Penerapan informasi teknologi yang belum optimal

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja BPPPT dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap review rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 disajikan dalam Tabel T.C-31 sebagai berikut:

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Berjalannya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar			1.352.432.287	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Berjalannya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar			1.352.432.287	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM & PTSP	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	15.000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM & PTSP	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	15.000,000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPM & PTSP	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	61.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPM & PTSP	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	61.800.000	

3.	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	DPM & PTSP	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Admistrasi Keuangan	12	Bulan	137.840.000	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	DPM & PTSP	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Admistrasi Keuangan	12	Bulan	137.840.000
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Alat Bantu Kebersihan Kantor	12	Bulan	18.314.967	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Alat Bantu Kebersihan Kantor	12	Bulan	18.314.967
5.	Penyediaan alat tulis kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	106.778.920	Penyediaan alat tulis kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	106.778.920
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPM & PTSP	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	26.025.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPM & PTSP	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	26.025.000
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	20,673,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	20,673,400

8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPM & PTSP	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	20,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPM & PTSP	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	20,000,000	
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPM & PTSP	Tersedianyan Makanan dan Minuman	12	Bulan	6,000,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPM & PTSP	Tersedianyan Makanan dan Minuman	12	Bulan	6,000,000	
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah dan dalam daerah	DPM & PTSP	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	12	Bulan	940.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah dan dalam daerah	DPM & PTSP	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	12	Bulan	940.000.000	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna daerah			290.650.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna daerah			290.650.000	
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1	Paket	46.800.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%		46.800.000	

2.	Pemeliharaan rutin/ Berkala gedung kantor	DPM & PTSP	Terpeliharanya Gedung Kantor	12	Bulan	26.000.000	Pemeliharaan rutin/ Berkala gedung kantor	DPM & PTSP	Terpeliharanya Gedung Kantor	12	Bulan	26.000.000	
3.	Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	DPM & PTSP	Terlaksananya perlengkapan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	2	Unit kendaraan roda 4	179.650.000	Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	DPM & PTSP	Terlaksananya perlengkapan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	3	Unit kendaraan roda 4	179.650.000	
				18	Unit kendaraan roda 2					18	Unit kendaraan roda 2		
4.	Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	38.200.000	Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	38,200,000	
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Disiplin Aparatur			58.500.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Disiplin Aparatur			58.500.000	

1.	Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	DPM & PTSP	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	75	Stel	58.500.000	Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	DPM & PTSP	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	78	Stel	58.500.000	
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase ASN sesuai kompetensi	-		23.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase ASN sesuai kompetensi	-		23,000,000	
1.	Pengembangan SDM	DPM & PTSP	Meningkatnya sumberdaya aparatur (SDM)	12	Bulan	23.000.000	Pengembangan SDM	DPM & PTSP	Meningkatnya sumberdaya aparatur (SDM)	12	Bulan	23,000,000	
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP ‘ B ‘			55.320.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP ‘ B ‘			55.320.000	

1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	DPM & PTSP	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	12	Bulan	55.320.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	DPM & PTSP	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	12	Bulan	55.320.000	
VI.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPM & PTSP	- penanaman Modal Jumlah IKM yang menjalin kerjasama Investasi dan Perdagangan (Pelaku Usaha Komoditi Lokal) -Jumlah jalinan kerjasama pameran Investasi			263.940.000	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPM & PTSP	- penanaman Modal Jumlah IKM yang menjalin kerjasama Investasi dan Perdagangan (Pelaku Usaha Komoditi Lokal) -Jumlah jalinan kerjasama pameran			263.940.000	
1	Penyelenggaraan pameran investasi	DPM & PTSP	Terlaksannya Promosi Potensi Daerah dan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Tingkat Nasional Maupun Luar Negeri	2	Pameran Investasi	155.400.000	Penyelenggaraan pameran investasi	DPM & PTSP	Terlaksannya Promosi Potensi Daerah dan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Tingkat Nasional Maupun Luar Negeri	2	Pameran Investasi	155.400.000	

2	Fasilitasi Peningkatan Kerjasama antar Usaha	DPM & PTSP	Terjalannya Kerjasama strategis antar dunia usaha	3	Iklim	11.940.000	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antsr Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	DPM & PTSP		3	Iklim	11.940.00	
3	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	DPM & PTSP	Teridentifikasinya Peluang dan Potensi pembangunan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dokumen Pemetaan Kawasan Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	70	%	96.600.000	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	DPM & PTSP	Teridentifikasinya Peluang dan Potensi pembangunan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dokumen Pemetaan Kawasan Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	70	%	96.600.000	
VII	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi	DPM & PTSP	Nilai Investasi			192.833.473	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi	DPM & PTSP	Nilai Investasi			192.833.473	

1	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM & PTSP	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal PMDN/ PMA	15	Perusahaan	16.883.000	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM & PTSP	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal PMDN/ PMA	15	Perusahaan	16.883.000	
2	Pengelolaan Sistem Informasi dan analisis Data Penanaman Modal	DPM & PTSP	Terjalannya Koordinasi yang baik anatr lembaga dalam pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/ PMA	10	Perusahaan	151.067.500	Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/ PMA	DPM & PTSP	Terjalannya Koordinasi yang baik anatr lembaga dalam pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/ PMA	10	Perusahaan	151.067.500	
3	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM & PTSP	Terjaganya Iklim Investasi Berjalan dengan Baik	1	Dokumen	24.883.000	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah	DPM & PTSP	Tersedianya Mekanisme Perizinan Penanaman Modal	1	Dokumen	113,602,500	

VIII.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	DPM & PTSP	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai peraturan			530.484.300	Program Peningkatan Pelayanan Publik	DPM & PTSP	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai peraturan			530.484.300	
1	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	DPM & PTSP	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	A	Nilai	122.760.000	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	DPM & PTSP	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	A	Nilai	122.760.000	
2	Penanganan Pengaduan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPM & PTSP	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat	20	Kasus	33.400.000	Penanganan Pengaduan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPM & PTSP	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat	20	Kasus	33.400.000	
3	Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPM & PTSP	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Perizinan dan Non Perizinan	15	Orang	94.024.300	Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPM & PTSP	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Perizinan dan Non Perizinan	15	Orang	94.024.300	

5	Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan	DPM & PTSP	Terinventarisasi Data Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2500	Izin	19.400.000	Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan	DPM & PTSP	Terinventarisasi Data Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2500	Izin	19.400.000	
6	Pemeriksaan Layanan Perizinan	DPM & PTSP	Kelaurnya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan	2800	Izin	126.100.000	Pemeriksaan Layanan Perizinan	DPM & PTSP	Kelaurnya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan	2900	Izin	126.100.000	
7	Peningkatan Inovasi Layanan	DPM & PTSP	Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan	90	Naskah Izin	134.800.000	Pelayanan Keiling	DPM & PTSP	Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan	90	Naskah Izin	134.800.000	
JUMLAH						2.767.160.087	JUMLAH						2.767.160.087

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Akhir SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2017, Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Berdasarkan hal diatas, usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang pada tingkat kecamatan, Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagaimana pada tabel T-C.32 Sebagai Berikut :

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4		6
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPM & PTSP	Berjalanan Pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	1.352.432.287	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM & PTSP	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	15.000.000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPM & PTSP	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	61.800.000	
3.	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	DPM & PTSP	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	137.840.000	
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Alat Bantu Kebersihan Kantor	18.314.967	
5.	Penyediaan alat tulis kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Alat Tulis Kantor	106.778.920	
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPM & PTSP	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	26.025.000	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20.673.400	

8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPM & PTSP	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPM & PTSP	Tersedianya Makanan dan Minuman	6.000.000	
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah dan dalam daerah	DPM & PTSP	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	940.000.000	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPM & PTSP	Persententase kecakupan sarana dan prasarana layak guna Perangkat Daerah	290.650.000	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	46.800.000	
2	Pemeliharaan rutin/ Berkala gedung kantor	DPM & PTSP	Terpeliharanya Gedung Kantor	26.000.000	
3	Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	DPM & PTSP	Tersedianya Dana Pemeliharaan Kendaraan Dinas	197.650.000	
4	Pemeliharaan ruitn/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPM & PTSP	Tersedianya Dana Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	38.200.000	
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DPM & PTSP	Tingkat disiplin apartur	58.500.000	
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	DPM & PTSP	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	58.500.000	
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPM & PTSP	Persentase ASN sesuai kompetensi	23.000.000	
1.	Pengembangan SDM	DPM & PTSP	Meningkatnya sumberdaya aparatur (SDM)	23.000.000	

V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DPM & PTSP	Persentase Perangkat daerah dengan nilai AKIP "B"	53.320.000	
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	DPM & PTSP	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	53.320.000	
VI.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPM & PTSP	- Penanaman Modal Jumlah IKM yang menajlin kerjasama Investasi dan Perdagangan (Pelaku Usaha Komoditi Lokal) - Jumlah Jalinan Kerjasama Pameran Investasi	263.940.000	
1	Fasilitasi Peningkatan Kerjasama antar Usaha	DPM & PTSP	Terjalannya Kerjasama strategis antar dunia usaha	11.940.000	
2	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	DPM & PTSP	Tersedianya Perencanaan Penanaman Modal yang dapat digunakan oleh Investor, Instansi dan Unit Kerja Lain	96.600.000	
3	Penyelenggaraan pameran investasi	DPM & PTSP	Terlaksannya Promosi Potensi Daerah dan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Tingkat Nasional maupun Luar Negeri	155.400.000	
VII.	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	DPM & PTSP	Nilai Investasi	192.833.500	
1	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM & PTSP	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal PMDN/ PMA	16.883.000	

2	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM & PTSP	Terjaganya Iklim Investasi Berjalan Dengan Baik	24.883.000	
3	Pengelolaan Sistem Informasi dan Analisis Data Penanaman Modal	DPM & PTSP	Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	151.067.500	
VIII.	Program Pelayanan Publik	DPM & PTSP	Jumlah Izin yang diterbitkan sesuai pertauran	530.484.300	
1	Survei indeks kepuasan masyarakat	DPM & PTSP	Nilai Kepuasan Masyarakat	122.760.000	
2	Penanganan Pengaduan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal	DPM & PTSP	Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat	33.400.000	
3	Sosialisasi kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan	DPM & PTSP	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Perizinan dan Non Perizinan	940.024.300	
4	Pemeriksaan layanan perijinan	DPM & PTSP	Keluarnya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan	126.100.000	
5	Peningkatan Inovasi Layanan	DPM & PTSP	Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan	134.800.000	
6	Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan	DPM & PTSP	Terinventarisasinya Data Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	19.400.000	
JUMALAH				2.767.160.087	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu dari fungsi strategis penyelenggaraan pemerintahan, fungsi strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjng Jabung Barat Sebagai salah satu instansi di lingkungan pemerintah daerah perlu ditunjang dengan kesiapan perangkat kerja dan perencanaan strategis yang tepat. Perencanaan strategis yang disusun digunakan untuk memetakan fungsi strategis dalam bentuk pernyataan visi, misi, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan sangat diperlukan guna tercapainya tujuan organisasi. Arah kebijakan pelayanan perijinan terpadu satu pintu sebagai model dari pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah, waktu yang cepat dan biaya yang transparan. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjng Jabung Barat:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Mengurangi jumlah “Perantara” dalam pengurusan perijinan sehingga dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat dan biaya yang transparan.
3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan dengan mengembangkan pelayanan prima yang berbasis teknologi informasi serta mewujudkan keterpaduan dan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.
4. Pelayanan yang ramah, mudah cepat dan transparan serta tanggap dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perijinan dan non perijinan yang diterima masyarakat.
5. Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan dan selaras terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Tanjng Jabung Barat. Koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan Dinas / Instansi Teknis dan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Meningkatkan mutu pelayanan dengan pengembangan inovasi pelayanan perijinan dan non perijinan serta peningkatan kompetensi, integritas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA AKHIR PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Kaitan antara tujuan, sasaran dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjng Jabung Barat adalah seperti diuraikan di bawah ini.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan Pembangunan di bidang Perijinan menetapkan **VISI “MEWUJUDKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN BERINVESTASI YANG MUDAH, TRANSPARAN DAN PASTI”** Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

1. Pelayanan Perijinan dan berinvestasi yang mudah bermakna bahwa proses pelayanan perijinan dan berinvestasi tidak berbelit-belit, mudah di mengerti dan tidak melibatkan personil yang melebihi beban volume kerja yang berdampak pada biaya.
2. Pelayanan Perijinan dan berinvestasi yang murah bermakna bahwa meminimalisir biaya yang dikeluarkan dan bila memungkinkan bebas biaya.
3. Pelayanan Perijinan dan berinvestasi yang pasti bermakna bahwa ijin yang telah diperoleh dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tujuan dan setiap tujuan memiliki sasaran tertentu maka ditetapkanlah Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola administrasi kantor untuk mencapai efisiensi efektifitas dan kenyamanan kerja.
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi Perizinan penanaman modal dan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama penanaman modal untuk dapat mentransformasikan segala potensi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi kekuatan ekonomi yang nyata secara efektif dan efisien.
4. Meningkatkan promosi peluang investasi serta produk unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di dalam dan luar negeri.
5. Meningkatkan pelayanan Perizinan penanaman modal dan Investasi sesuai dengan kewenangan Kabupaten.
6. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan Perizinan penanaman modal dan Investasi pada perusahaan fasilitas dan non fasilitas sesuai dengan kewenangan Kabupaten.

Dari Penjabaran di atas, maka didapat tujuan dan sasaran dari Misi Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai Berikut :

1. Melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi informasi yang komprehensif dan kontinyu sesuai dengan perkembangan yang ada dalam pengelolaan perijinan dan non perijinan serta perizinan penanaman modal dan investasi;
2. Melakukan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang mendukung proses perijinan dan non perijinan serta Perizinan penanaman modal dan investasi yang berbasis IT;
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga lain dalam transparansi biaya perijinan dan non perijinan serta Perizinan penanaman modal dan Investasi dengan teknologi yang terintegrasi;
4. Melakukan pelayanan yang terbuka dan mudah dengan berbasis teknologi informasi melalui penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi;

5. Melakukan system pengelolaan perijinan yang handal dengan mengembangkan pola pelayanan perijinan yang efektif dan efisiensi yaitu tepat waktu, tepat biaya, dan tepat sasaran sehingga tercipta system pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan pasti.
6. Menciptakan suasana perkantoran yang tenang, aman dan nyaman khususnya bagi pemohon/publik;
7. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur;
8. Perekrutan pegawai dengan profesional dan terbuka untuk umum melalui metode uji kepatutan dan uji kelayakan (Fit and Proper Test);
9. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan Sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal dan informal;
10. Melakukan sinergitas pengelolaan pelayanan perijinan yang tangguh dengan stakeholders sesuai prinsip koordinasi, instegrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
11. Melakukan menandatangani Pakta Integritas bagi seluruh Sumber Daya Aparatur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Oleh karena itu dalam pendanaan lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat bagi peningkatan perijinan dan non perijinan serta Perizinan penanaman modal dan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang akan digunakan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional
- Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pengembangan SDM

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Pengelolaan Sistem Informasi dan analisis Data Penanaman Modal

7. Program Pelayanan Publik

- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- Penanganan Pengaduan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal
- Sosialisasi Kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan
- Pemeriksaan Layanan Perijinan
- Peningkatan Inovasi Layanan
- Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan

8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

- Fasilitasi Peningkatan Kerjasama antar Usaha
- Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
- Penyelenggaraan Pameran Investasi

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (Dua Belas Kegiatan) Kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel T.C-33 sebagai berikut :

**TABEL : T-C.33
RUMUSAN RENCANA AKHIR PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1.02.12.1.02.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Lancar	DPM & PTSP			1.352.432.287	APBD			1.161.000.000
1.02.12.1.02.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	DPM & PTSP	12	Bulan	15,000,000	APBD	12	Bulan	24.000.000

1.02.12.1.02.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM & PTSP	12	Bulan	61.800.000	APBD		12	Bulan	140.000.000
1.02.12.1.02.12.01.07	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPM & PTSP	12	Bulan	137.840.000	APBD		12	Bulan	97.000.000
1.02.12.1.02.12.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat Bantu Kebersihan Kantor	DPM & PTSP	12	Bulan	18.314.967	APBD		12	Bulan	30.000.000
1.02.12.1.02.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPM & PTSP	12	Bulan	106.778.920	APBD		12	Bulan	200.000.000
1.02.12.1.02.12.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DPM & PTSP	12	Bulan	26.025.000	APBD		12	Bulan	190.000.000

1.02.12.1.02.12.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPM & PTSP	12	Bulan	20.673.400	APBD		12	Bulan	60.000.000
1.02.12.1.02.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPM & PTSP	12	Bulan	20.000.000	APBD		12	Bulan	35.000.000
1.02.12.1.02.12.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianyan Makanan dan Minuman	DPM & PTSP	12	Bulan	6,000,000	APBD		12	Bulan	35.000.000
1.02.12.1.02.12.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah dan dalam daerah	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	DPM & PTSP	12	Bulan	940.000.000	APBD		12	Bulan	350.000.000
1.02.12.1.02.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna perangkat daerah	DPM & PTSP			290.650.000	APBD				500.000.000

1.02.12.1.02.12.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	DPM & PTSP	1	Paket	46.800.000	APBD		1	Paket	100.000.000
1.02.12.1.02.12.01.02.20	Pemeliharaan rutin/ Berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	DPM & PTSP	12	Bulan	26.000.000	APBD		12	Bulan	100.000.000
1.02.12.1.02.12.01.02.22	Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya perlengkapan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	DPM & PTSP	2	Unit kendaraan roda 4	179.650.000	APBD		2	Unit kendaraan roda 4	220.000.000
			DPM & PTSP	18	Unit kendaraan roda 2		APBD		18	Unit kendaraan roda 2	
1.02.12.1.02.12.01.02.24	Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPM & PTSP	12	Bulan	38.200.000	APBD		12	Bulan	80.000.000
1.02.12.0.02.12.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin apartur	DPM & PTSP			58.500.000	APBD				70.000.000

1.02.12.1.02.12.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	DPM & PTSP	75	Stel	58.500.000	APBD		75	Stel	70.000.000
1.02.12.1.02.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN sesuai Kompetensi	DPM & PTSP	78	%	23.000.000	APBD		78	%	70.000.000
1.02.12.1.02.12.01.05.05	Pengembangan SDM	Meningkatnya sumberdaya aparatur (SDM)	DPM & PTSP	12	Bulan	23.000.000	APBD		12	Bulan	70.000.000
1.02.12.1.02.12.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ASN sesuai Kompetensi	DPM & PTSP			55.320.000	APBD				260.000.000

1.02.12.1.02.12.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	DPM & PTSP	12	Bulan	55.320.000	APBD		12	Bulan	260.000.000
1.02.12.1.02.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	- Penanaman Modal Jumlah IKM yang menjalin kerjasama Investasi dan Perdagangan -Jumlah jalinan kerjasama pameran investasi	DPM & PTSP			263.940.000	APBD				510.000.000
1.02.12.1.02.12.01.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksannya Promosi Potensi Daerah dan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Tingkat Nasional Maupun Luar Negeri	DPM & PTSP	2	Pameran Investasi	155.400.000	APBD		2	Pameran Investasi	255.000.000
1.02.12.1.02.12.01.15.12	Fasilitasi Peningkatan Kerjasama antar usaha	Terjalinya Kerjasama strategis antar dunia usaha	DPM & PTSP	3	Iklim	11.940.000	APBD		3	Iklim	100.000.000

1.02.12.1.02.12.01.15.05	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Teridentifikasinya Peluang dan Potensi pembangunan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dokumen Pemetaan Kawasan Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	DPM & PTSP	70	%	96.600.000	APBD		70	%	155.000.000
1.02.12.1.02.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi	Nilai Investasi	DPM & PTSP			192.833.473	APBD				510.000.000
1.02.12.1.02.12.01.16.10	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal PMDN/ PMA	DPM & PTSP	15	Perusahaan	16.883.000	APBD		15	Perusahaan	200.000.000

1.02.12.1.02.12.01.16.15	Pengelolaan Sistem Informasi dan analis Data Penanaman Modal	Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPM & PTSP	1	Dokumen	151.067.500	APBD		1	Dokumen	200.000.000
1.02.12.1.02.12.01.16.16	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terjaganya Iklim Investasi Berjalan dengan Baik	DPM & PTSP	20	Perusahaan	24.883.000	APBD		20	Perusahaan	110.000.000
1.02.12.1.02.12.01.19	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya jaminan dan jangkauan pelayanan perizinan akuntabel dan transparan	DPM & PTSP			503.484.300	APBD				1.520.000.000

1.02.12.1.02.12.01.19.01	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Penyelenggaraab Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPM & PTSP	A	Nilai	122.760.000	APBD		A	Nilai	210.000.000
1.02.12.1.02.12.01.19.02	Penanganan Pengaduan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat	DPM & PTSP	20	Kasus	33.400.000	APBD		20	Kasus	210.000.000
1.02.12.1.02.12.01.19.10	Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Perizinan dan Non Perizinan	DPM & PTSP	15	Orang	94.024.300	APBD		15	Orang	-
1.02.12.1.02.12.01.19.06	Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan	Terinventarisasinya Data Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	DPM & PTSP	2500	Izin	19.400.000	APBD		2500	Izin	350.000.000

1.02.12.1.02.12.01.19.07	Pemeriksaan Layanan Perizinan	Kelaurnya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan	DPM & PTSP	2800	Izin	126.100.000	APBD		2900	Izin	600.000.000
1.02.12.1.02.12.01.19.11	Peningkatan Inovasi Layanan	Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan	DPM & PTSP	90	Naskah Izin	134.800.000	APBD		90	Naskah Izin	150.000.000
JUMLAH				-		2.767.160.087			-		4.611.000.000

BAB IV

PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan Rencana Kerja di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kabupaten Tanjung Tahun 2016-2021.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran beserta jajarannya pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melalui pemberian

dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DPM & PTSP juga tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi segenap unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2020, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Kuala Tungkal, Juli 2019

KEPALA DINAS,

H. YAN ERY, S.Pt, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700930 199703 1 003